

KEBIJAKAN UMKM INDONESIA: AKSES THD PEMBIAYAAN

PEREKONOMIAN INDONESIA 2018

Mengapa UMKM Penting ?

❖ Kontribusi UMKM bagi pembangunan ekonomi (2013)

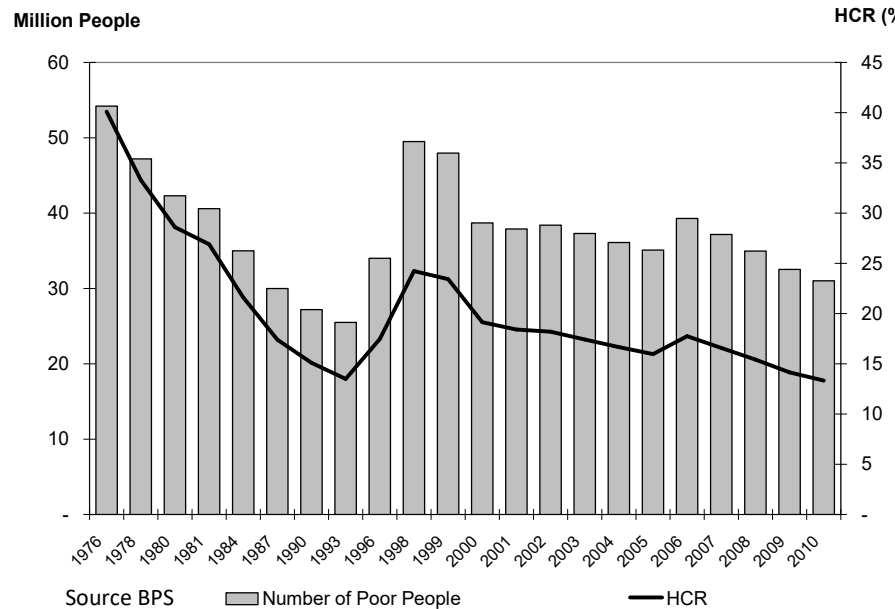
PDB	• UMKM: 57,6 % (Rp 1.536,9 triliun) • Usaha besar: 42,4 %
Penyerapan Tenaga Kerja	• UMKM: 96,9 % (114 million) • Usaha besar: 3,1 %
Ekspor Nonmigas	• UMKM: 15,7 % (Rp 182,1 triliun) • Usaha besar: 85,9 %
Investasi	• UMKM: 56,2 % (Rp 341,3 triliun) • Usaha besar: 43,8 %

* Harga Konstan 2000

Mengapa UMKM Penting ?

- Pemerintah melihat UMKM sebagai salah satu **kanal** untuk mewujudkan **pertumbuhan ekonomi inklusif**
 - Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di kisaran 5%, namun masih ada beberapa isu berkaitan dengan **kualitas pertumbuhan**, diantaranya:
 - Ketimpangan pendapatan
 - Kemiskinan
 - Pengangguran
- } Secara tren terus turun, tapi nilainya masih besar

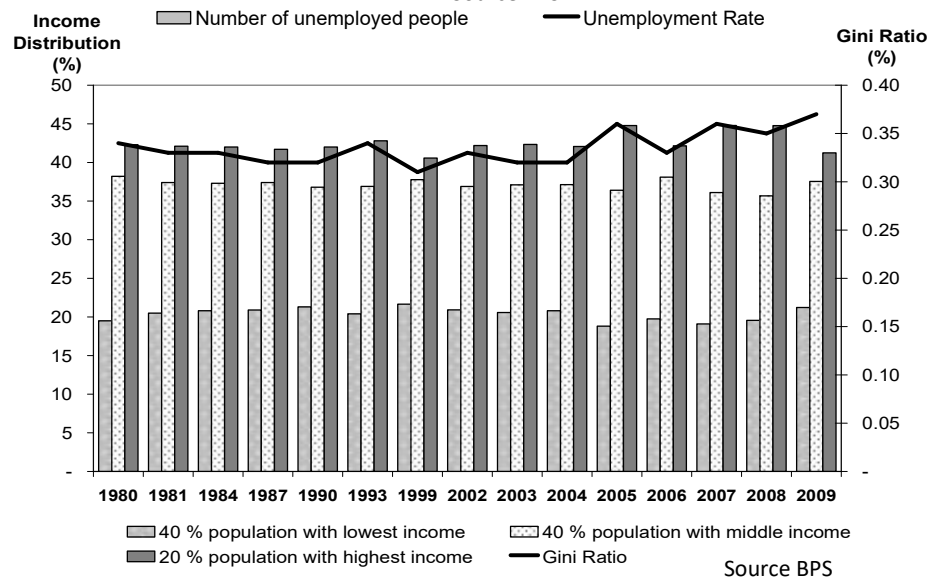
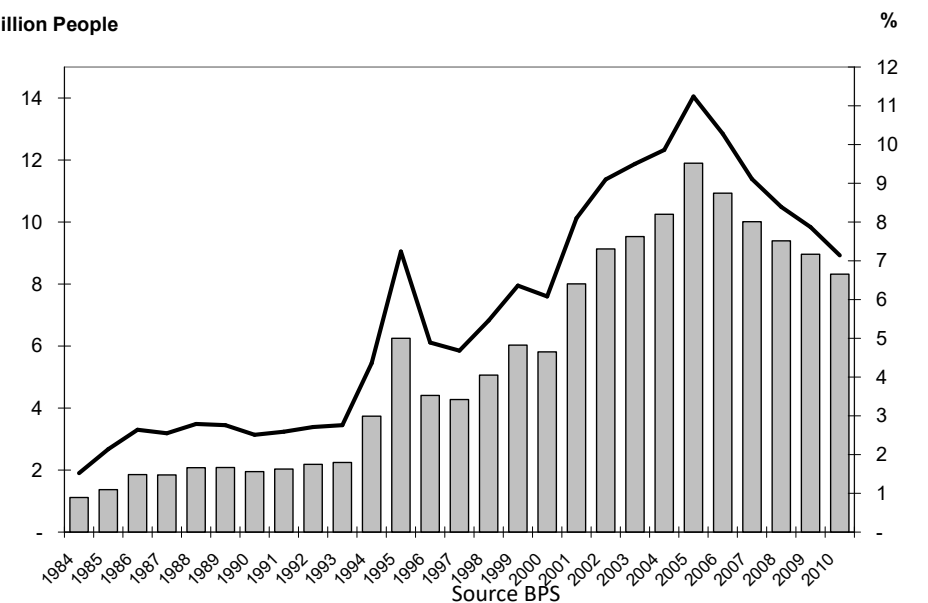
Kemiskinan, Pengangguran dan Ketimpangan Ekonomi Indonesia



	Rural	Urban	Total	Per Capita Income: Rural	Per Capita Income: Urban
Sumatra	15.0	12.2	13.9	357	558
Java-Bali	17.7	10.6	13.7	294	543
Nusa Tenggara	22.4	24.6	23.0	253	405
Kalimantan	9.1	5.1	7.5	376	697
Sulawesi	18.3	6.7	14.8	275	570
Maluku	25.9	7.5	20.9	313	591
Papua	46.3	5.9	37.1	315	707
Indonesia	18.9	10.7	14.1	311	550

Source: BPS, Resosudarmo and Yusuf 2009

Note: per capita income in Rp 000 (2008 price)



Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

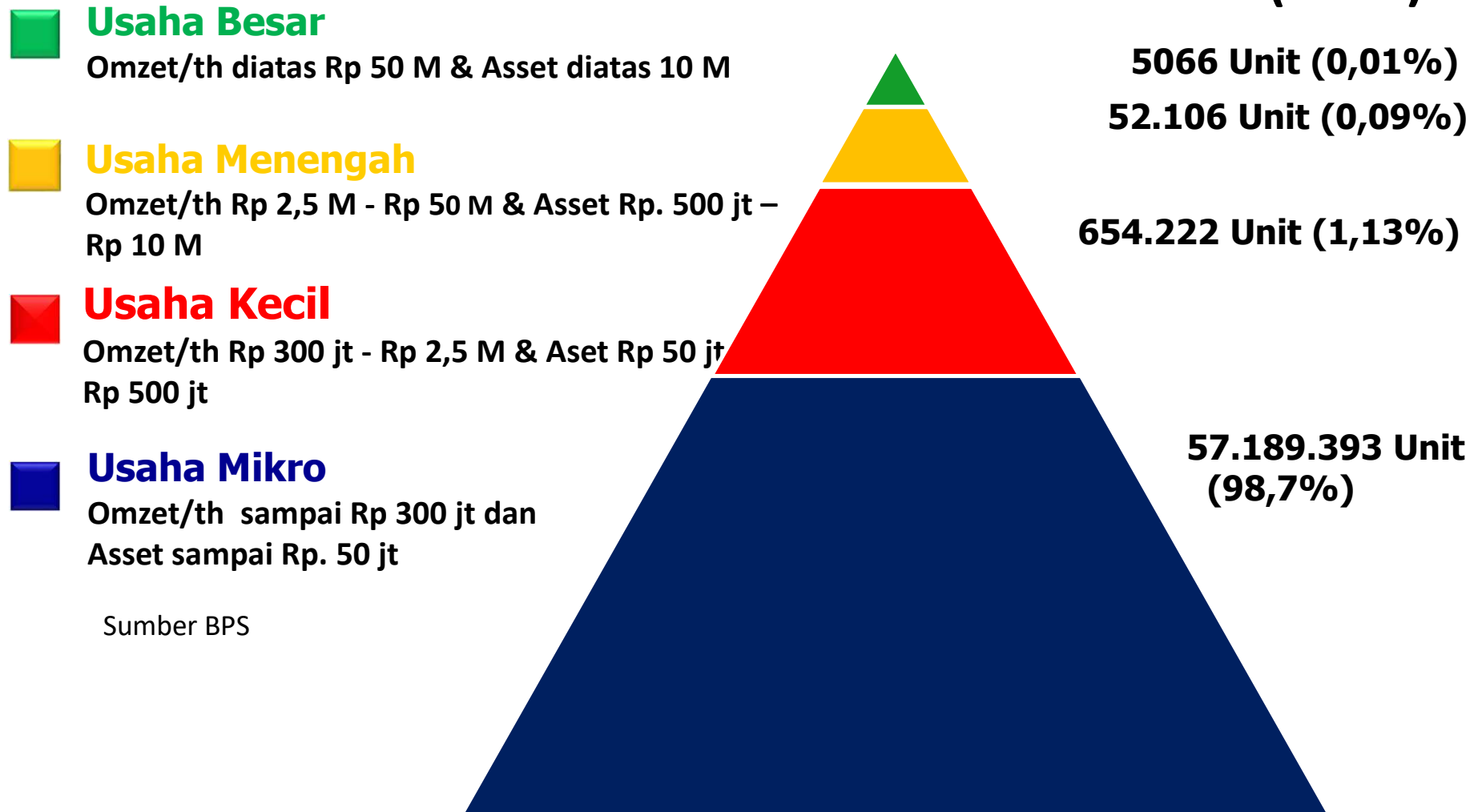
- Intinya, manfaat dari pertumbuhan ekonomi harus dapat dinikmati oleh **seluruh lapisan masyarakat** bukan hanya oleh si kaya tapi juga oleh pihak yang kurang beruntung (miskin)
- Ini tentang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang lebih memperhatikan **pemerataan akses dan kesempatan** kepada semua lapisan masyarakat
- Menitikberatkan kepada **penyerapan tenaga kerja produktif** dari pada redistribusi pendapatan (BLT) untuk menolong orang miskin

Upaya Pemerintah

- Pemerintah telah mendorong pengembangan UMKM melalui berbagai langkah kebijakan dan program
 - Saat ini ada +/- 20 K/L punya program pemberdayaan UMKM (incl. BPPT, LIPI, BI, BEKRAF)
 - Anggaran APBN untuk UMKM jika di total juga sangat besar ($\geq$ Rp 20 T)
 - Ada kementerian khusus yang mengurus UKM & Koperasi (Kemenkopukm)
 - Berbagai paket kebijakan ekonomi untuk dorong UMKM
- Tapi hasil yang diharapkan belum kelihatan ?

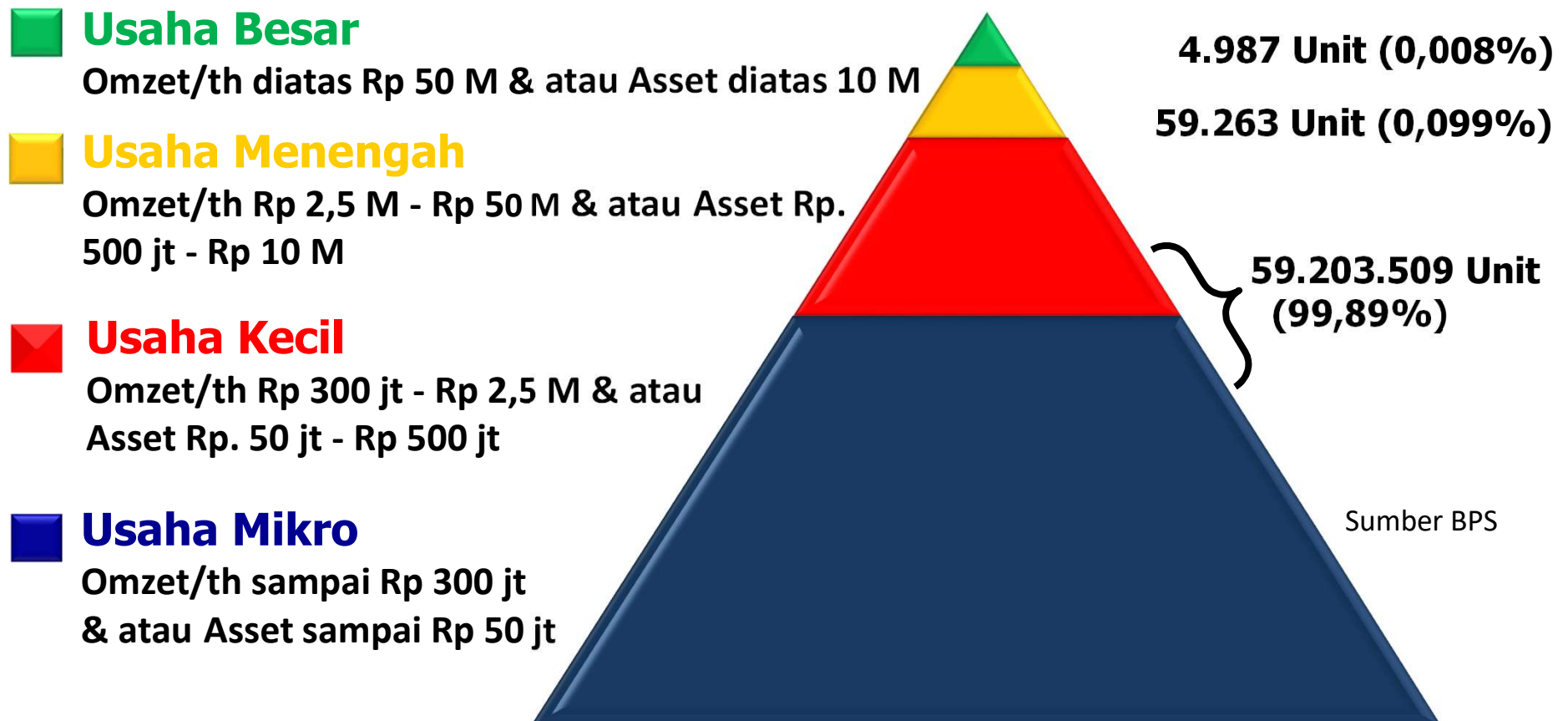
Definisi & Jumlah Unit UMKM (UU 20/2008)

TOTAL : 57.900.787 UNIT (2013)

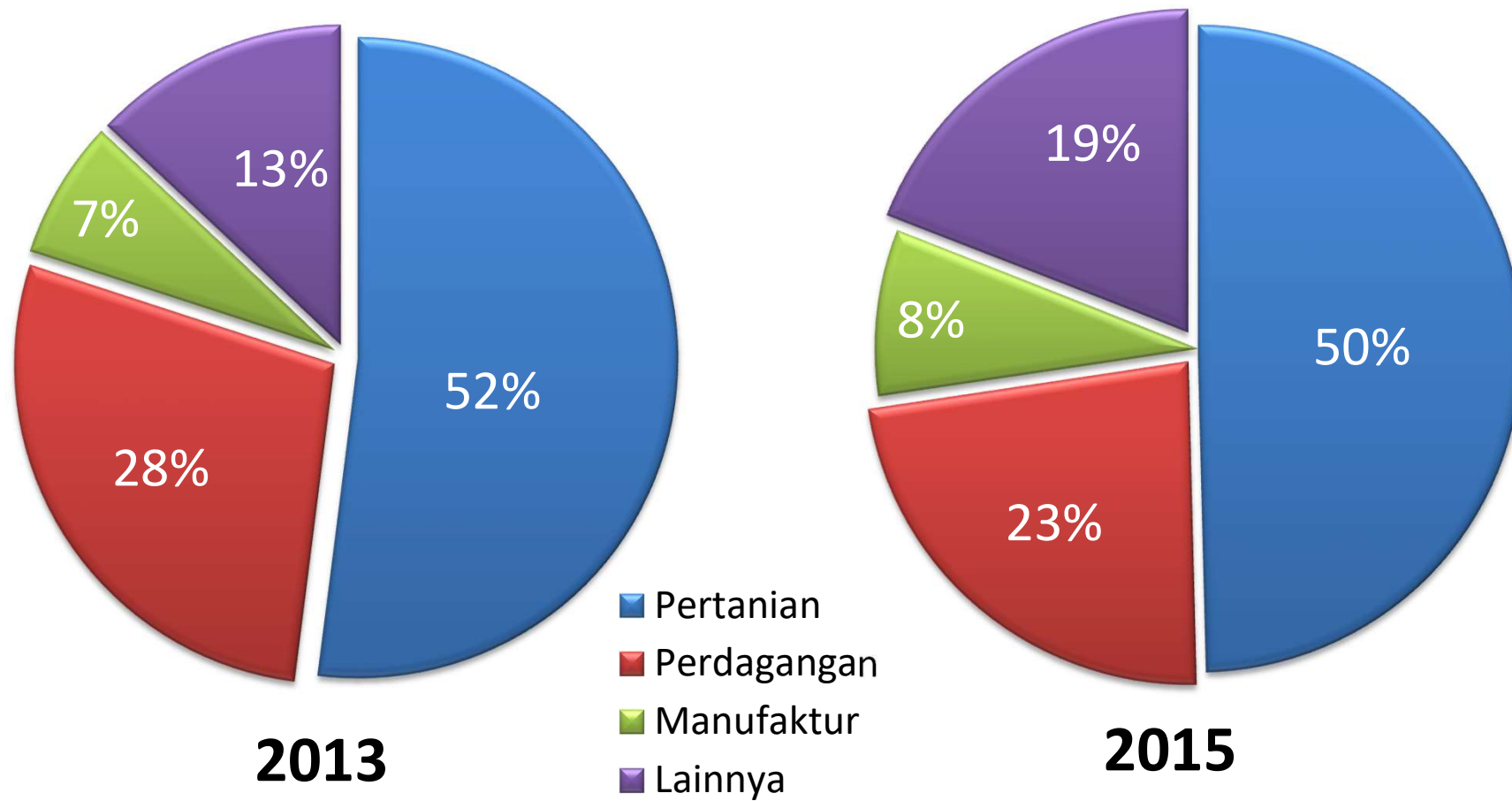


Definisi dan Jumlah Unit UMKM (UU no.20/2008)

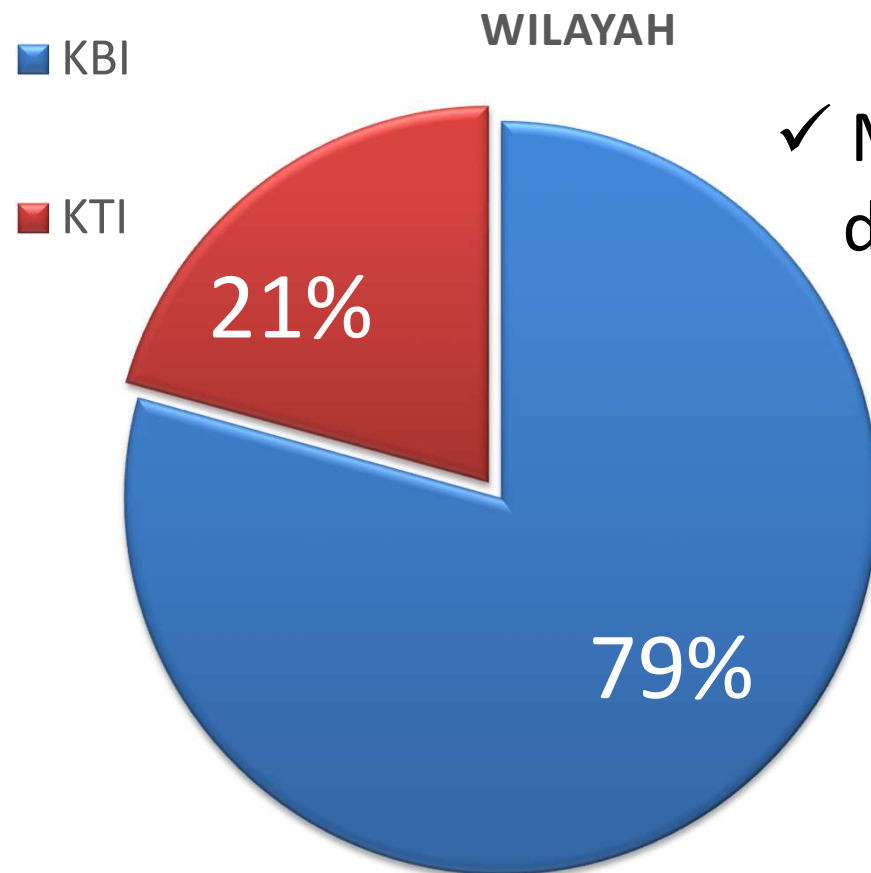
TOTAL : 59.267.759 UNIT (2015)



Sektor UMKM



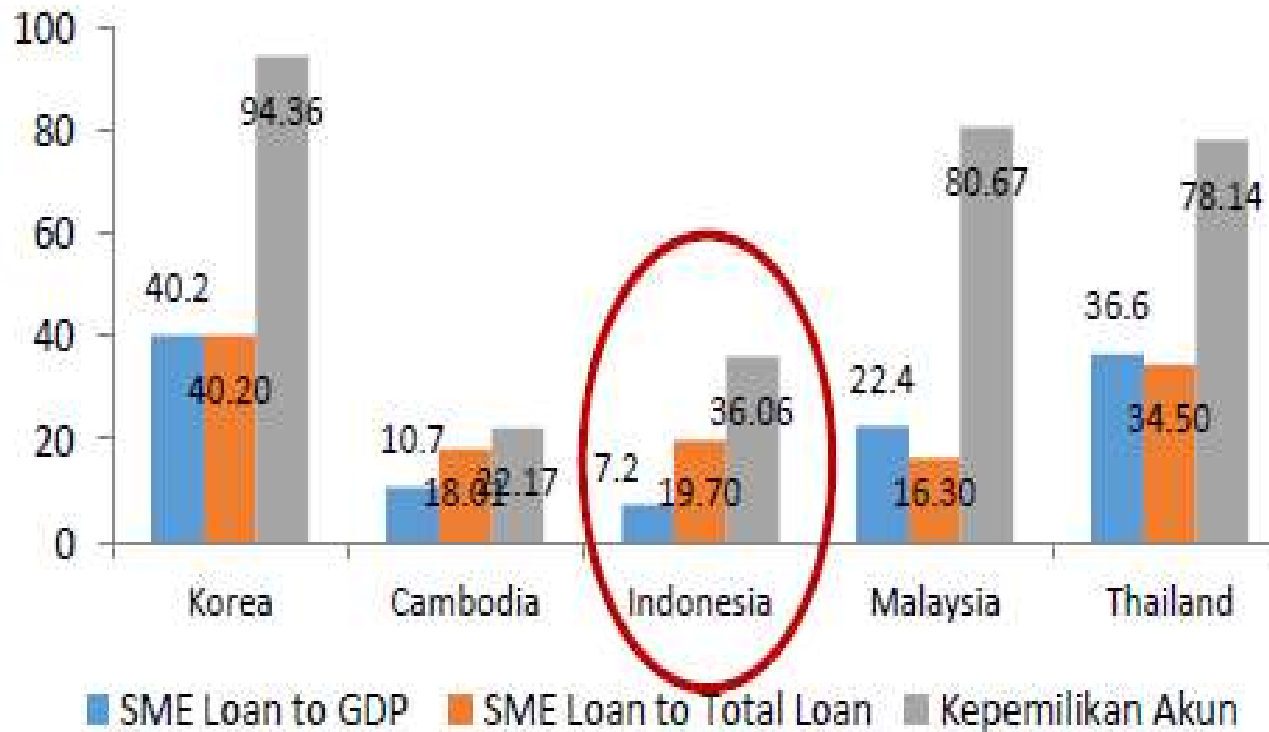
Lokasi & Wilayah Persebaran UMKM



✓ Mayoritas lokasinya tersebar di wilayah pedesaan (*rural*)

Perbandingan Pembiayaan UMKM

- Dukungan pembiayaan UMKM di Indonesia hanya sebesar 7.2% dari PDB, masih dibawah Kamboja, Malaysia dan Thailand



Sumber: dikutip dari presentasi BI di Jamkrindo
Asia SME Finance Monitor ADB 2014
WB Global Findex 2014

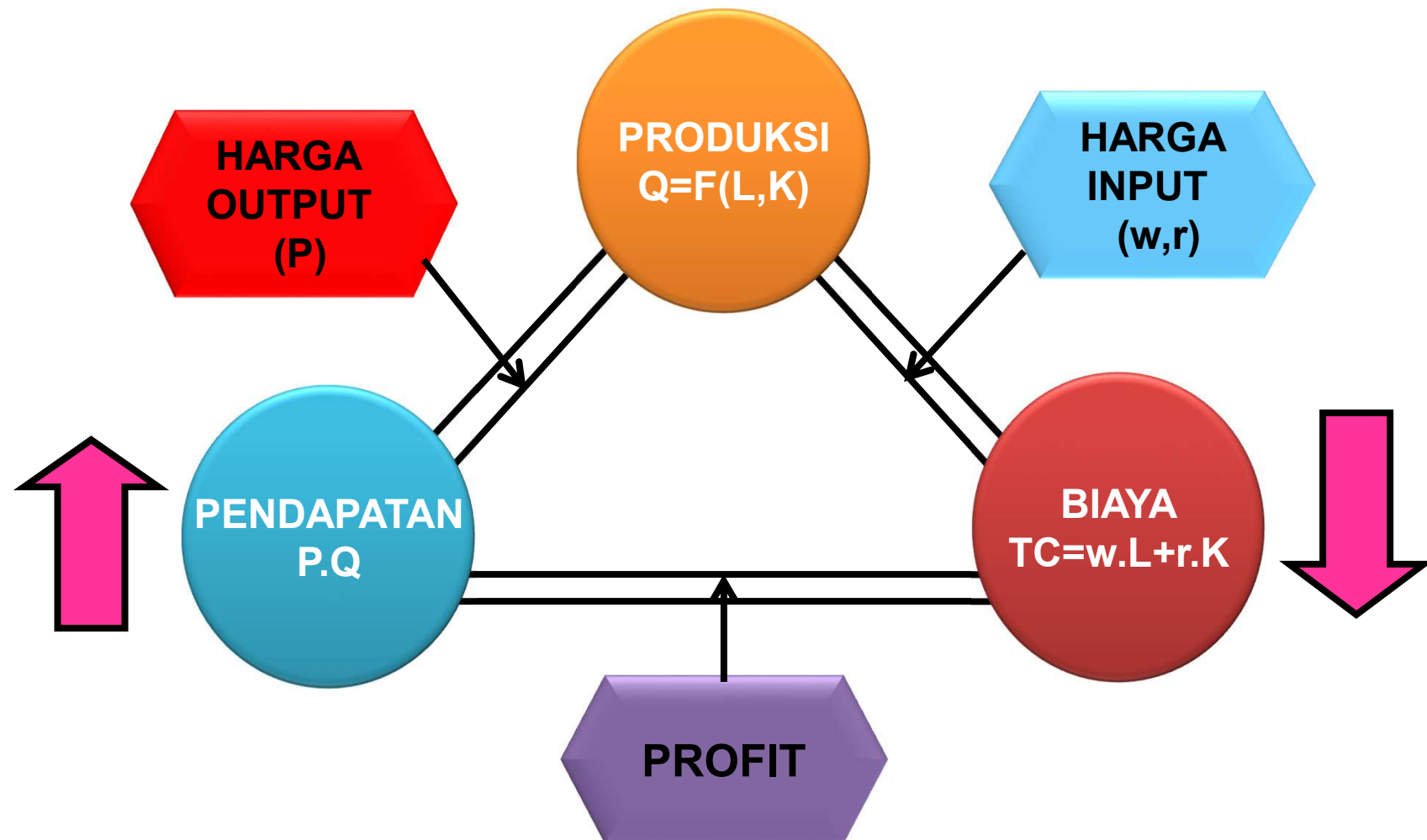
Fakta Lain UMKM Indonesia

- Mayoritas berstatus usaha domestik, bukan FDI ataupun *joint venture* dengan asing
- Mayoritas penjualannya untuk mengisi pasar DN, bukan ekspor
- Mayoritas menjual langsung ke konsumen, bukan bagian dari *supply chain*
- Mayoritas tenaga kerjanya berpendidikan SLTA ke bawah dan masih ada pertalian kekerabatan
- Mayoritas masih berstatus informal, tanpa dokumen legal

Isu/topik Seputar UMKM



Unit Usaha: Mikroscope



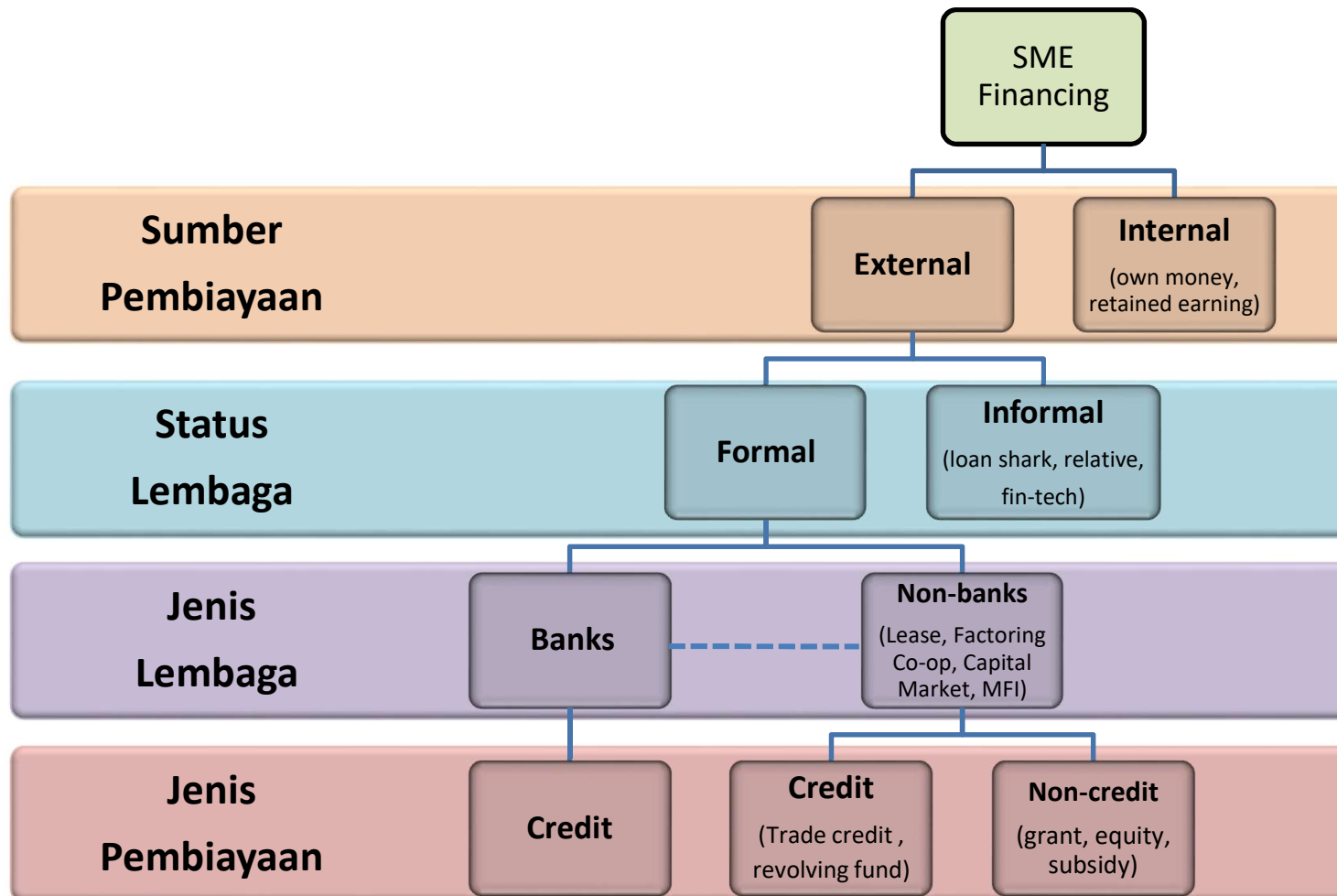
Inklusi Keuangan (*Financial Inclusion*)

- Yang ingin didorong pemerintah adalah **pemerataan akses** finansial bagi UMKM → program inklusi keuangan
- Individual dan bisnis **memiliki akses** kepada produk dan/atau jasa keuangan yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhannya – bertransaksi/menabung/bayar kredit atau asuransi yang tersedia secara bertanggungjawab dan berkelanjutan (World Bank)
- Produk/jasa keuangan ini diberikan oleh **lembaga formal** seperti ***perbankan*** maupun ***non-perbankan*** (asuransi, pasar modal, koperasi, dll) dalam sistem keuangan nasional.
- Akses terhadap produk/jasa finansial ini membuat UMKM mampu merencanakan dan mengembangkan bisnisnya.

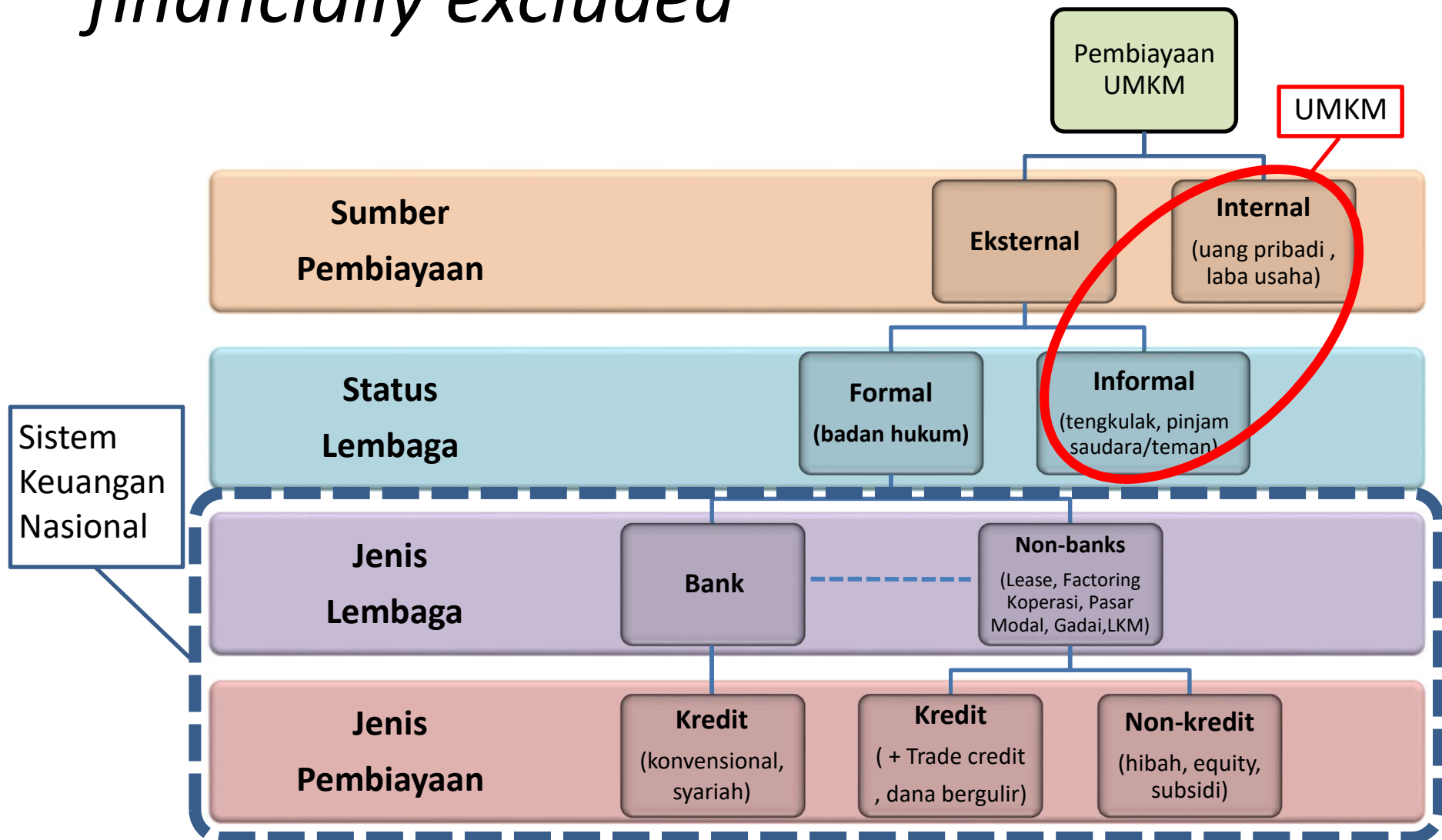
Sumber Pembiayaan UMKM dan Inklusi Keuangan

- Dari berbagai literatur, sumber pembiayaan UMKM mayoritas berasal dari **luar sistem keuangan**, yakni terdiri dari uang/tabungan sendiri, laba ditahan (sumber internal) atau pinjaman kerabat, tengkulak/rentenir (sumber external informal)
- Jadi, inklusi keuangan dalam konteks UMKM pada dasarnya adalah menggeser (“***shifting***”) dari sumber pembiayaan informal menjadi formal, baik melalui perbankan atau non-bank.

Taksonomi Pembiayaan UMKM

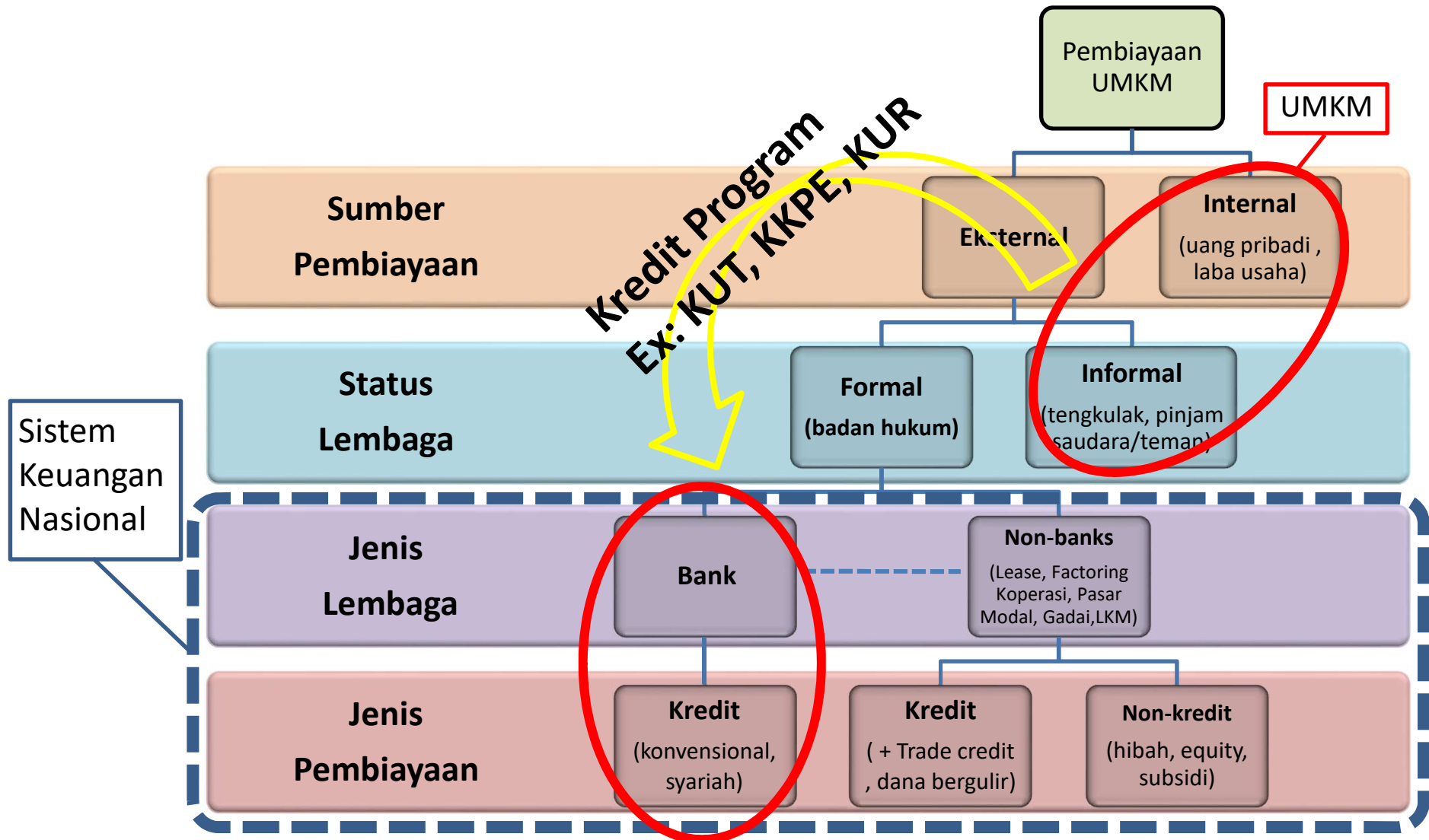


Pemetaan Sumber Pembiayaan UMKM: *financially excluded*



Pembiayaan UMKM Saat Ini:

Kredit Program (*financial inclusion*)



Program Inklusi Keuangan: Perbankan

- Saat ini, lembaga keuangan perbankan masih mendominasi sistem keuangan nasional (HURI 2009)
- Terbukti banyak kredit program untuk UMKM yang diluncurkan sejak tahun n 1970an, diantaranya KIK , KMKP, KCK, KUK, KUT, KKPE, KUPS, dan yang terakhir adalah KUR (Kredit Usaha Rakyat).
- Sejauh ini, keberhasilan kredit program2 tersebut masih belum sesuai harapan.

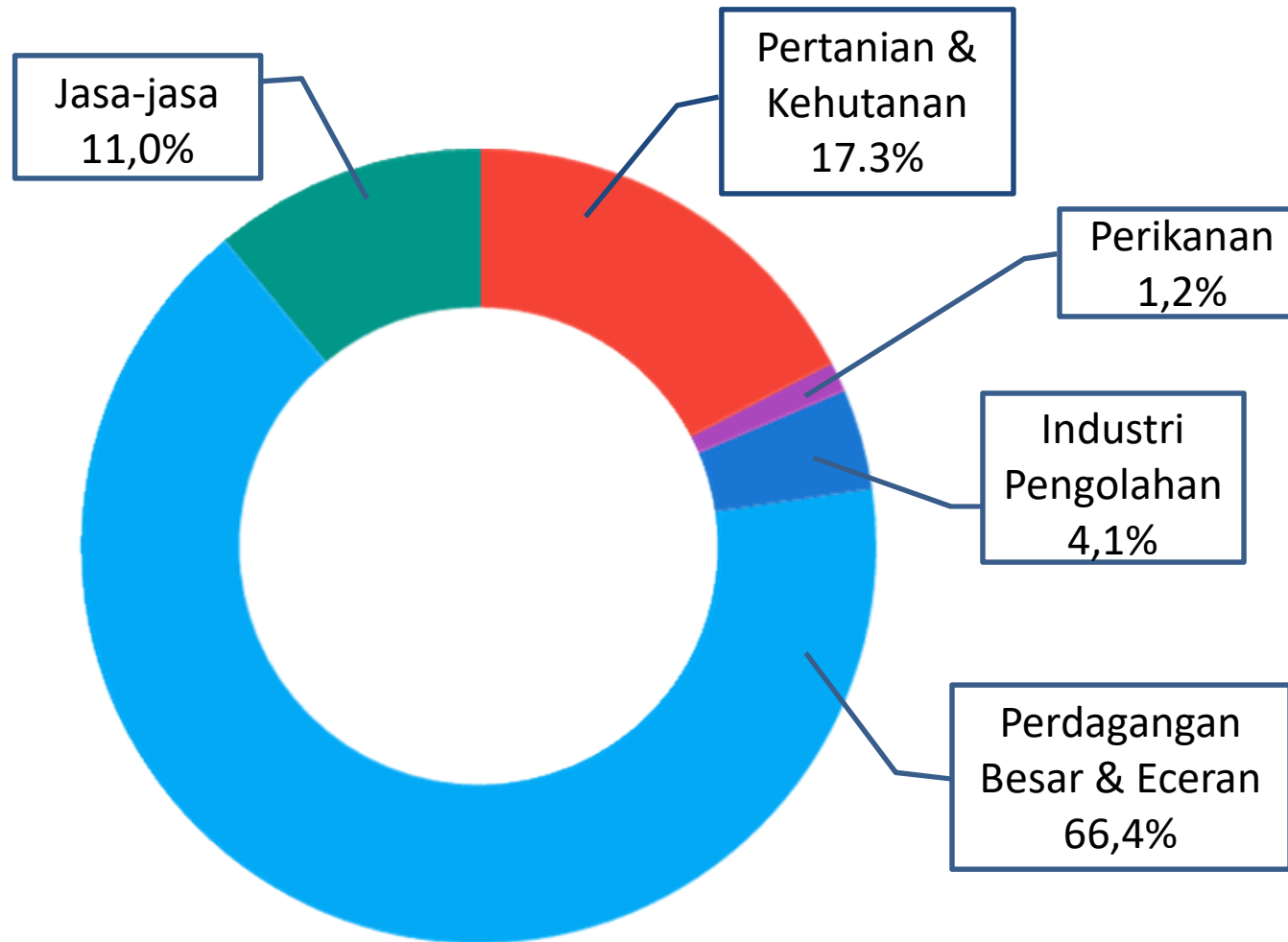
Sekilas Prinsip Bank

- Bank is a business of “**trust**”; fungsi intermediasi
- It's a **highly regulated industry** → BI, OJK, LPS
aturan prudensial (5C: character, capacity, condition
, capital, collateral)
- Instrumen utama: **suku bunga** (deposito, kredit)
- Concern utama: (i) menambah jumlah nasabah (**ekstensifikasi**) dan/atau (ii) pemanfaatan variasi produk/jasa keuangan oleh nasabah (**intensifikasi**)

Catatan: Kredit Usaha Rakyat (KUR)

- Program KUR dinilai kurang efektif mendukung program pemerintah mengentaskan kemiskinan (BPK). KUR lebih banyak dinikmati oleh kelompok usaha menengah (47%) dan kecil (31%), sementara kelompok usaha mikro hanya 22% (BI). KUR 74% salah sasaran (BKF)
- Ini terjadi karena ada kesenjangan (GAP) yang besar antara perbankan sebagai penyalur dengan usaha mikro.
- Perbankan “enggan” untuk menyalurkan KUR kepada usaha mikro karena ada isu *asymmetric information* dan *granularity* (nilai kecil & jumlah banyak).

Penyaluran KUR per Sektor 2016



Sumber: http://kur.ekon.go.id/realisasi_kur/2016/12

Isu Utama Pembiayaan Melalui Bank

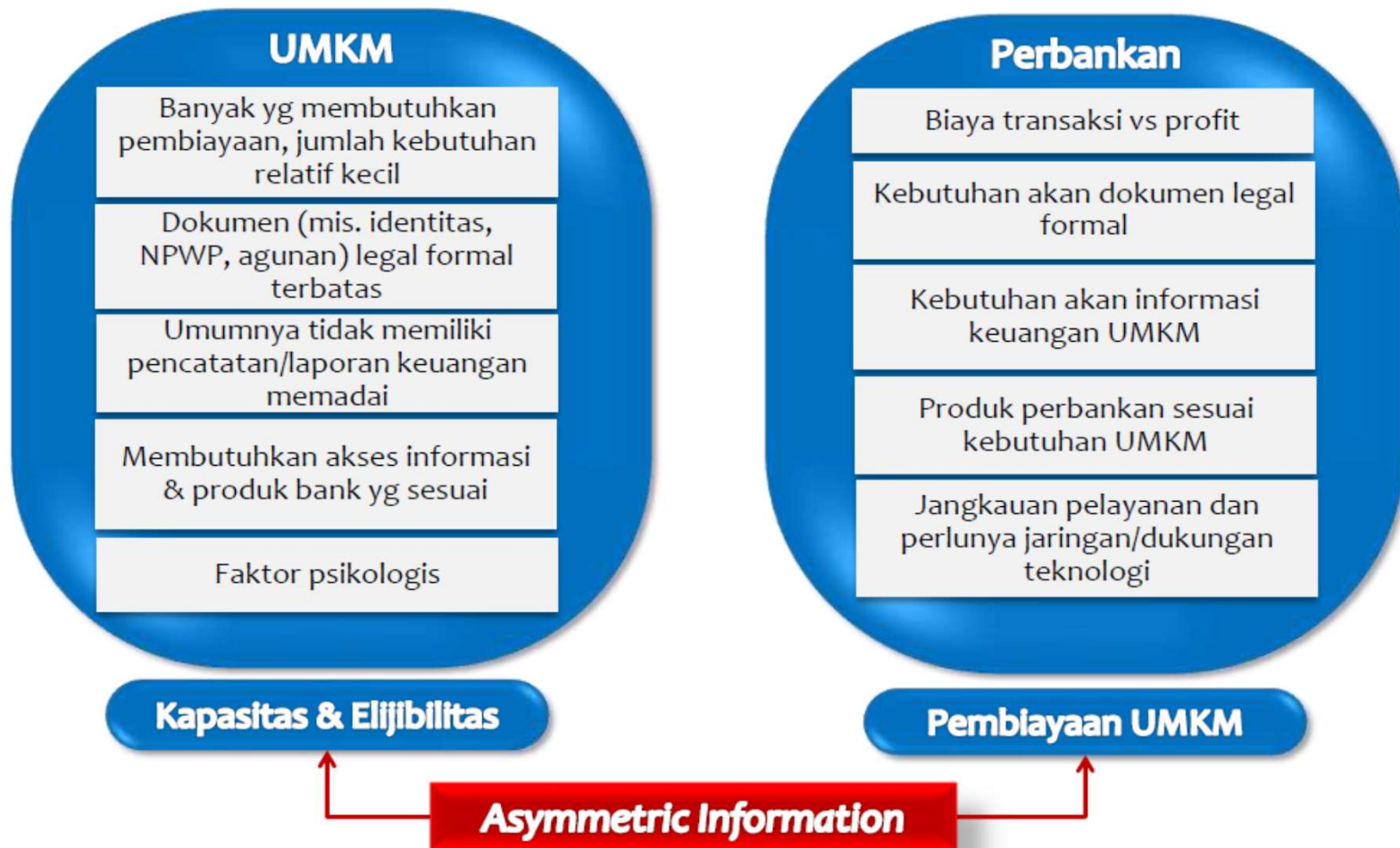
- ❖ Ada **kesenjangan yang lebar** antara lembaga keuangan bank dengan UMKM



Isu Utama Pembiayaan Bank

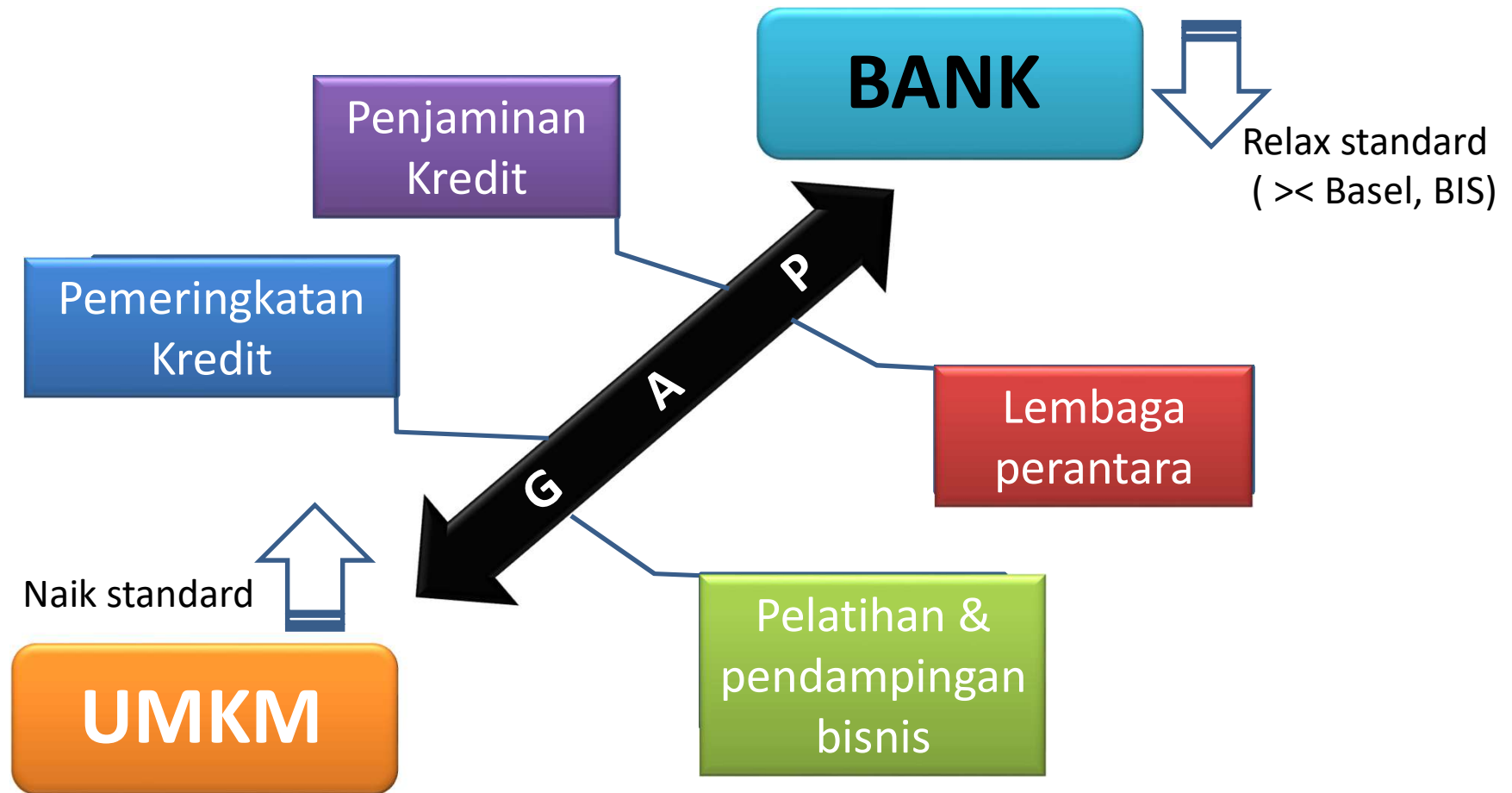
- Kesenjangan ini disebabkan oleh *asymmetric information* dan isu *granularity* (pinjaman kecil tapi banyak jumlahnya) → UMKM sering dipersepsikan sebagai bisnis yang punya resiko kegagalan tinggi (*high default risk*) , sehingga sering dikenakan suku bunga yang tinggi
- Lembaga keuangan bank sangat butuh tambahan informasi tentang kelaikan bisnis (*creditworthiness*) UMKM
- Dan dalam rangka menekan biaya transaksi, bank butuh dalam jumlah besar (skala ekonomi)

Kesenjangan UMKM v. Bank



Sumber: presentasi BI di Jamkrindo

Menjembatani Kesenjangan



Beberapa Catatan: Kebijakan Pembiayaan UMKM Saat Ini

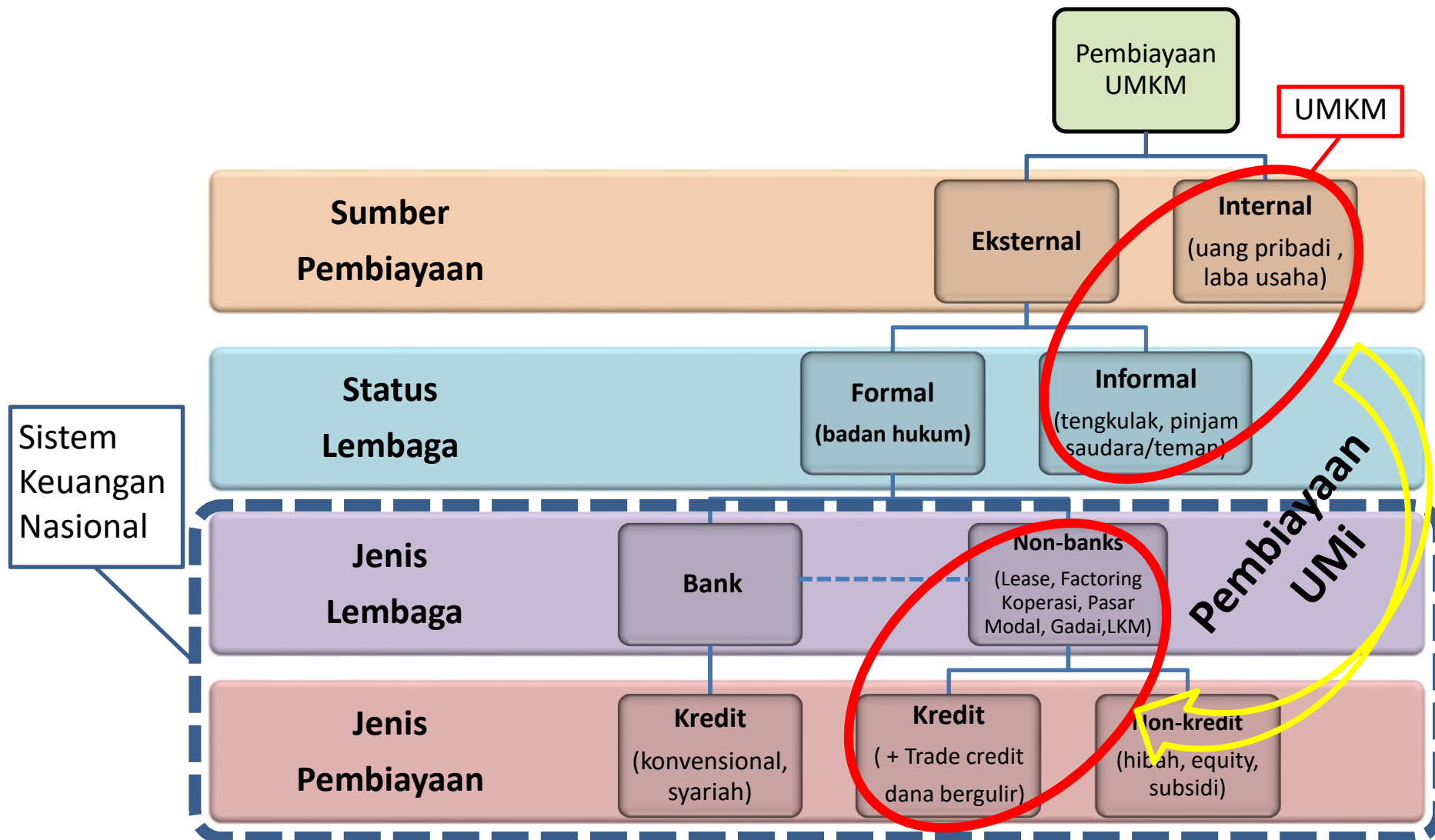
- **Inovasi produk/jasa keuangan** yang cocok untuk UMKM dalam sistem keuangan nasional masih kurang.
- Pembiayaan UMKM terlalu **fokus pada bank** dan berbentuk **kredit** dg berbagai variasi subsidi (subsidi bunga, subsidi penjaminan kredit). Rentan terhadap “*moral hazard*”.
- Instrumen dan peran lembaga **non-bank** (*leasing*, pasar modal, *factoring*, LKM, asuransi dll) dalam menyokong UMKM belum maksimal dan masih bersifat sporadis.

Beberapa Catatan: Kebijakan Pembiayaan UMKM Saat Ini

- Kebijakan masih bersifat “***one size fits all***” & belum mengakomodasi perbedaan karakteristik dari UMKM – *skala usaha* (mikro, kecil, menengah); *sektor* (pertanian, industri, jasa); *life cycle* (start up, pertumbuhan, internasionalisasi). KUR bukan “obat mujarab” untuk semua problem pembiayaan bagi UMKM. Butuh kombinasi kebijakan
- **Monitoring and Evaluation program UMKM** hampir tidak pernah dilakukan. KPI belum ada, tidak jelas dan parsial.
- **Aturan/regulasi** pendukung belum bisa mengikuti kecepatan inovasi produk/jasa pembiayaan

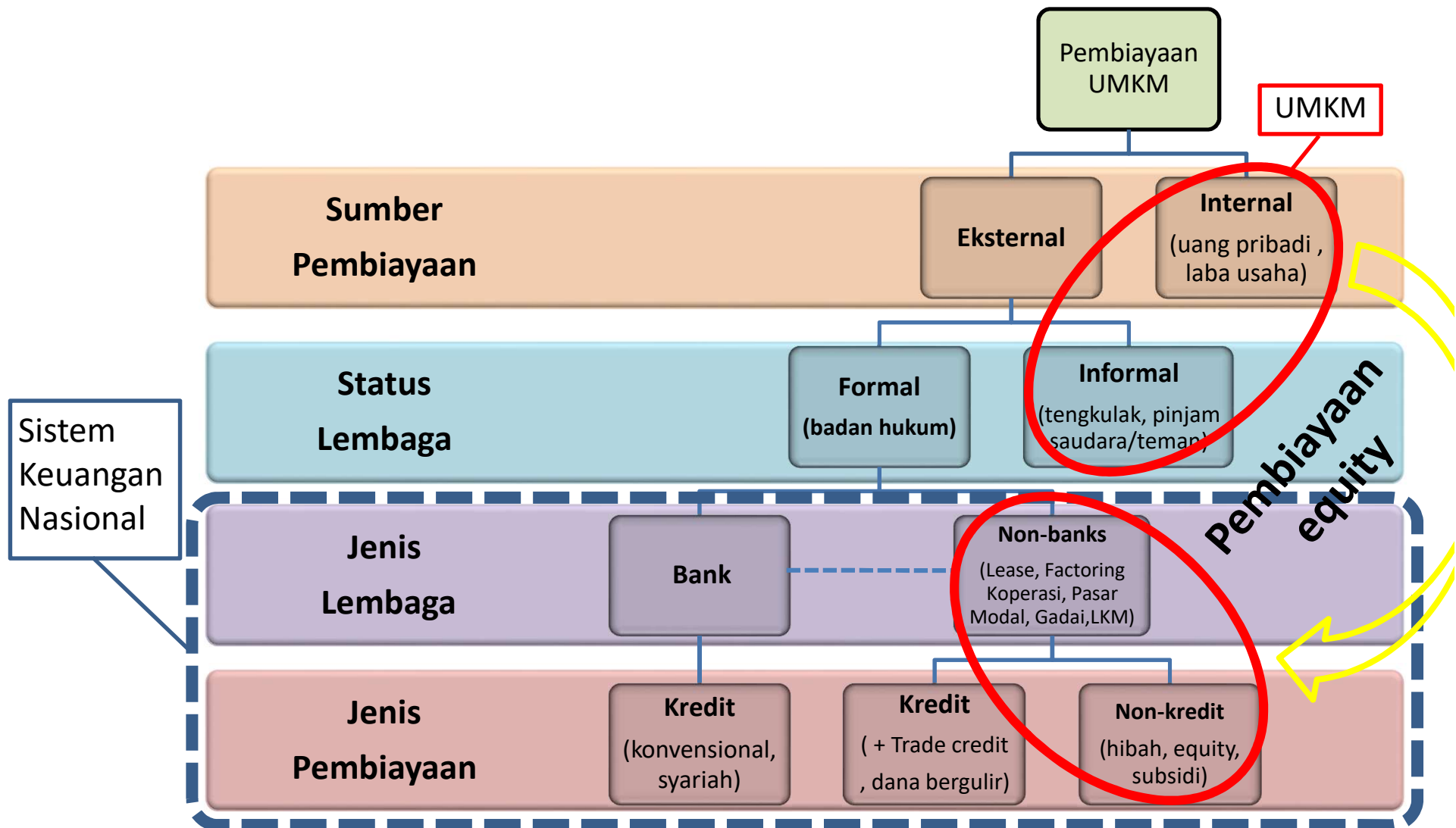
Pembiayaan UMKM Alternatif 1:

Pembiayaan UMi (*financial inclusion*)

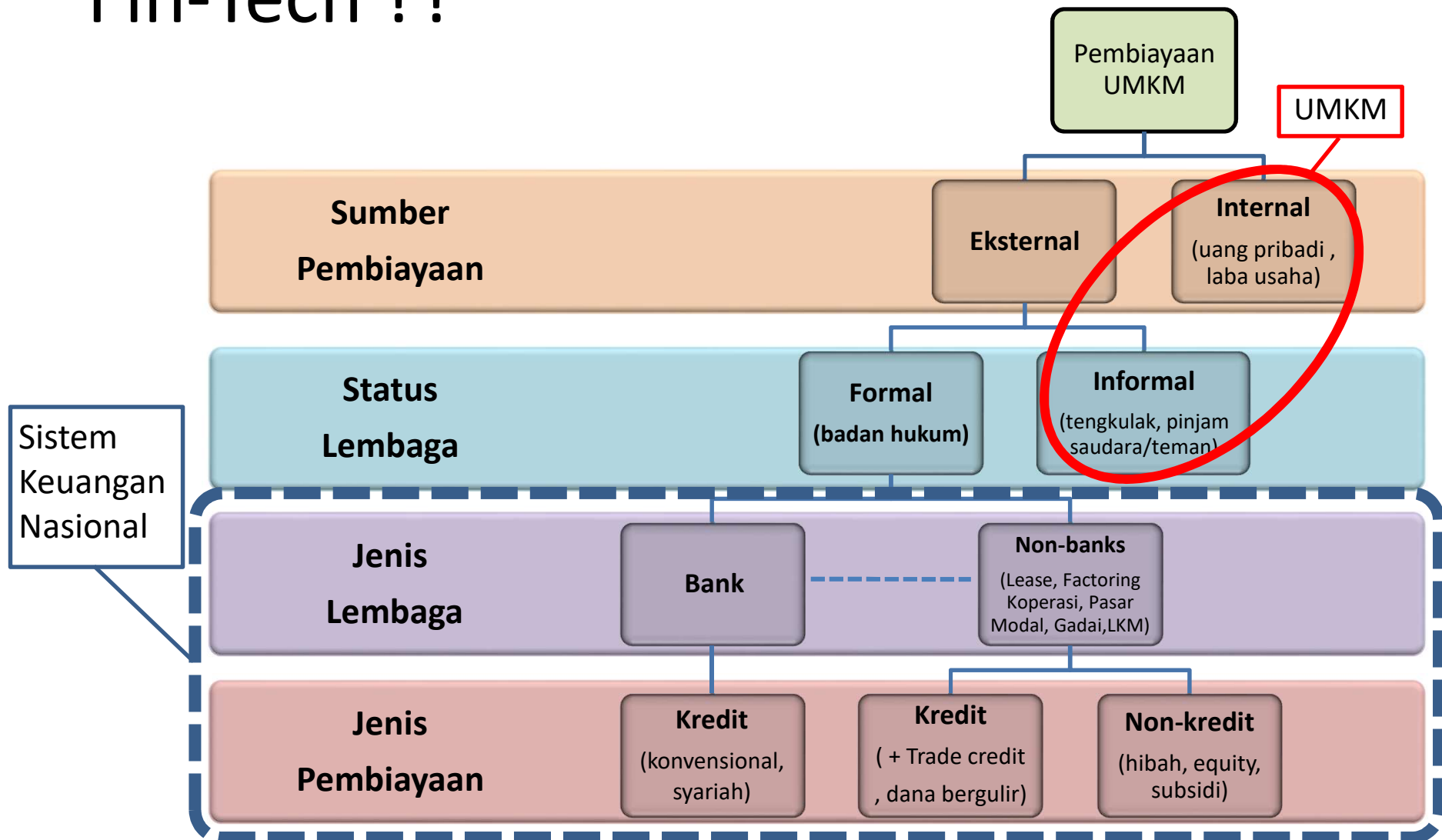


Pembiayaan UMKM Alternatif 2:

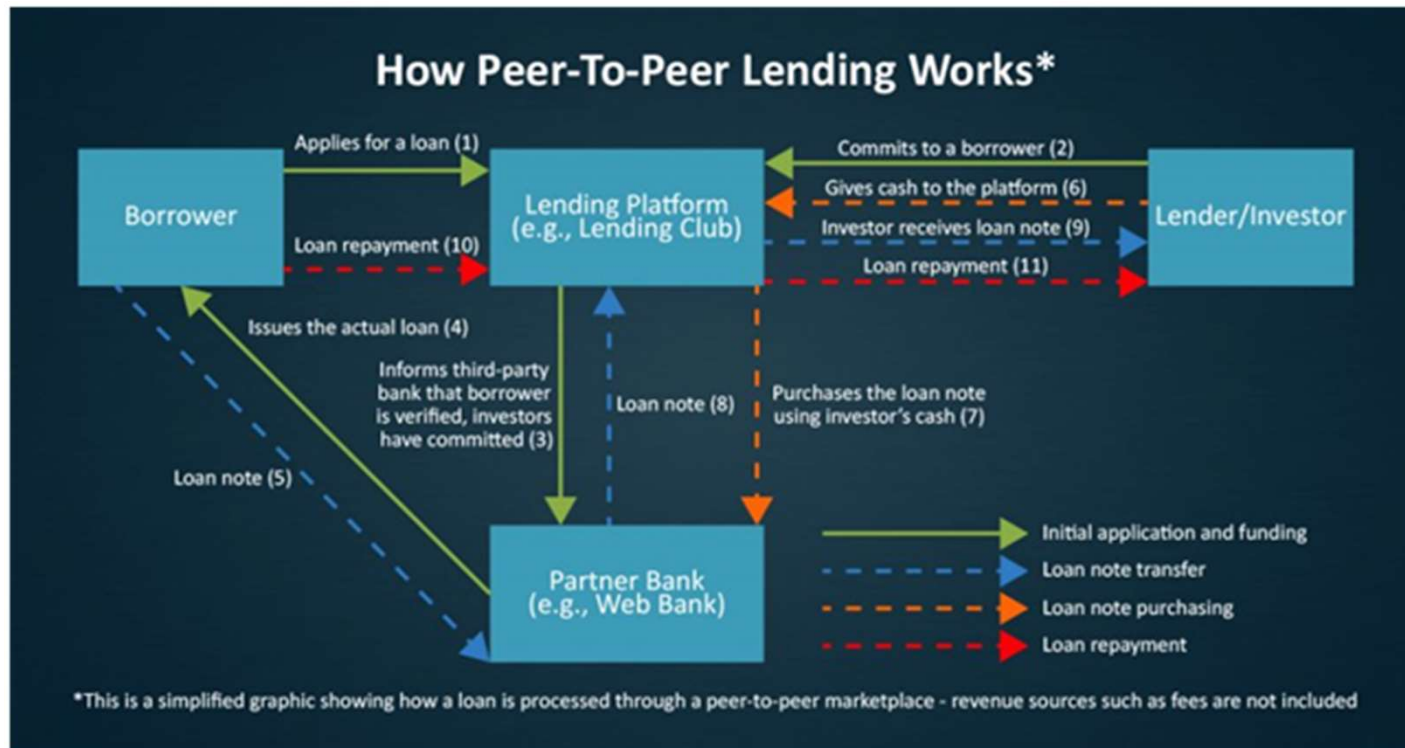
Pembiayaan UMi (*financial inclusion*)



Pemetaan Sumber Pembiayaan UMKM: Fin-Tech ??



Inovasi Pembiayaan UMKM: Fin-Tech



bareksa.com
investment portal



amarth

cekaja.com

investree



Wallet

Perbandingan: Skema Pembiayaan UMKM Singapore

	Start-up	Growth	Internationalisation
Financing Schemes		Debt-related Schemes	
	Micro Loan Programme (MLP)	Local Enterprise Finance Scheme (LEFS)	Internationalisation Finance Scheme (IF)
		Loan Insurance Scheme (LIS)	Loan Insurance Scheme (LIS)
		Equity-related Schemes	
	Business Angels Scheme (BAS)	Enterprise Fund	Enterprise Fund
Grant Schemes	SPRING SEEDS	Growth Financing Programme (GFP)	Growth Financing Programme (GFP)
		Grants	
	Patent Application Fund Plus (PAF Plus)		
	Innovation Development Scheme (IDS)	Patent Application Fund Plus (PAF Plus)	Patent Application Fund Plus (PAF Plus)
	Locally-based Enterprise Advancement Programme (LEAP)		
	Local Industry Upgrading Programme (LIUP)		

	Start-up	Growth	Internationalisation
Tax Incentive Schemes	Tax Exemption for Start-ups	Development and Expansion Incentive (DEI)	Double Deduction for Overseas Investment Development Expenditure (DD)
	Enterprise Investment Incentive Scheme (EII)		Overseas Investment Incentive (OII)
	Pioneer Incentive (PC-M or PC-S)		Overseas Enterprise Incentive (OEI)
	Industrial Exemption Factory Scheme	Licensed Warehouse Scheme (LWS)	Regional/International Headquarters Award (RHQ/IHQ)
	Zero GST Warehouse Scheme		Double Tax Deduction for Market Development (DTD)
Supporting programmes	Investment Allowance (IA)	Investment Allowance (IA)	Investment Allowance (IA)
		Global Trader Programme (GTP)	Global Trader Programme (GTP)
			Expansion Incentive for Partnerships (EIP)
		Trade Credit Insurance (TCI) Programme	
		Warehouse Retail Scheme	
		International Partners Programme (iPartners)	
		Local Enterprise Technical Assistance Scheme (LETAS)	

Skema Pembiayaan UMKM: India

I. MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

SME Division Scheme

1. Providing financial assistance on International Cooperation
2. Assistance to Training Institutions Scheme (ATI Scheme)
3. Marketing Assistance Scheme

Development Commissioner (DC-MSME)

1. Credit Guarantee Scheme
2. Credit Linked Capital Subsidy Scheme for Technology Upgradation
3. ISO 9000/ISO 14001 Certification Reimbursement Scheme
4. Micro & Small Enterprises Cluster Development Programme
5. Micro Finance Programme
6. MSME Market Development Assistance (MDA)
7. National Awards (for individual MSEs)
8. National Manufacturing Competitiveness Programme (NMCP)
 - i. Marketing Support/Assistance to MSMEs (Bar Code)
 - ii. Support for Entrepreneurial and Managerial Development of SMEs through incubators
 - iii. Enabling Manufacturing Sector: Be competitive through QMS & QT
 - iv. Building Awareness on Intellectual Property Rights(IPR)
 - v. Lean Manufacturing Competitiveness Scheme
 - vi. Design Clinic Scheme for design expertise to MSMEs manufacturing sector (DESIGN)
 - vii. Marketing Assistance & Technology Upgradation Scheme
 - viii. Technology and Quality Upgradation Support to MSMEs

NSIC Schemes

1. Performance and Credit Rating Scheme
2. Bank Credit Facilitation Scheme
3. Raw Material Assistance Scheme
4. Single Point Registration
5. Infomediary Services
6. Marketing Intelligence Services Lease
7. Bill Discounting Scheme
8. NSIC Infrastructure
 - i. NSIC Exhibition Hall – Hyderabad
 - ii. IT Incubator
 - iii. Exhibition cum Marketing Development Business Park
 - iv. Software Technology and Business Parks
 - v. NSIC Exhibition Grounds, New Delhi

II. MINISTRY OF AGRICULTURE

Enterprise Development (Direct/Indirect)

1. Agricultural Marketing Divisions scheme (Marketing Research and Information Network)
2. Strengthening of Agmark Grading Facilities
3. Development/Strengthening of Agricultural marketing infrastructure, Grading & Standardisation
4. Gramin Bhandaran Yojana: A Capital Investment Subsidy scheme for Construction/Renovation of Rural Godowns
5. Small Farmers' Agriculture-Business Consortium- Agriculture - Business Development scheme
6. Assistance to NCDC Programmes for Development of Cooperatives of Cooperatives
7. Establishment of Agri-clinics and Agri-Business Centres
8. National Horticulture Board
 - A. Development of Commercial Horticulture
 - i. Horticulture in Open Field
 - ii. Horticulture in Protected Cover
 - iii. Horticulture for Post harvest management projects
 - B. Capital investment subsidy scheme for construction/expansion / modernisation of cold storage and storages for horticulture
 - i. Cold storage unit - Basic mezzanine structure
 - ii. Cold storage unit - PEB Structure
 - iii. Cold storage unit using technology for controlled atmosphere
 - iv. Cold Chain scheme
 - v. Refrigerated transport vehicle scheme

IV. MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

Export Credit Guarantee Corporation of India Limited

1. Scheme relating to Exporter Credit Insurance
 - i. Small Exporters Policy - (SEP)
 - ii. Small and Medium Exporters Policy

VIII. MINISTRY OF FINANCE

SIDBI Schemes

1. Scheme for Growth Capital and Equity Assistance
2. Scheme for Refinance for Small Road Transport Operators(SRTOS)
3. Scheme for General Refinance Scheme (GRS)
4. Refinance scheme for textile industry under Technology Upgradation Fund

TERIMA KASIH